JURNAL KEPENDIDIKAN ISLAM

DOI: 10.15642/jkpi.2026.16.2.263-280
p-ISSN 2088-9305; e-ISSN 2777-0532
263-280

PANDANGAN ORANG TUA MENGENAI PENYALURAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SEBAGAI BENTUK UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH

Noor Alfi Fajriyani[1*], Siti Aisyah[2], Hadlori[3], Wildan[4], Uswatun Najiah[5], Nafila[6]
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usymuni Sumenep[123456], Indonesia
nooralfifajriyani@stitasumenep.ac.id

Corresponding Author: Noor Alfi Fajriyani

How to cite this article: Fajriyani, Noor Alfi, Siti Aisyah, Hadlori Hadlori, Wildan Wildan, Uswatun Najiah, and Nafila Nafila. "PANDANGAN ORANG TUA MENGENAI PENYALURAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SEBAGAI BENTUK UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH". Jurnal Kependidikan Islam 15, no. 2: 149–155. https://jurnalftk.uinsa.ac.id/index.php/JKPI/article/view/5724.

Abstract

This study examines a parent's perspective on the distribution of the Program Indonesia Pintar (PIP) assistance and its perceived contribution to educational access at MI Ma'arif Ngliseng, Bantul. A qualitative single-case study was conducted on 19–21 May 2023, involving one PIP administrative teacher and one parent of a student receiving assistance. Data were collected through interviews guided by four questions, observation and documentation, and interpreted through data reduction, presentation and conclusion drawing. Findings indicate that the school facilitated collective disbursement for recipients without ATM access, communicated procedural requirements through a WhatsApp group, and, according to both informants, delivered IDR 450,000 to the recipient parent without deductions. Assistance was reportedly used for school-related costs, including books, stationery, uniforms and bags. These findings suggest perceived procedural openness and reduced short-term educational expenses in the case studied. However, the small number of informants and brief fieldwork do not establish program effectiveness or educational equity more broadly.
Keyword: *parental perspective; Program Indonesia Pintar; educational access; madrasah; assistance distribution*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan orang tua mengenai penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan kaitannya dengan dukungan terhadap akses pendidikan di MI Ma'arif Ngliseng Bantul. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus tunggal yang dilaksanakan pada 19–21 Mei 2023. Informan terdiri atas seorang guru pengelola PIP dan seorang orang tua peserta didik penerima bantuan. Data diperoleh melalui wawancara berpedoman pada empat pertanyaan, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa sekolah membantu proses pencairan secara kolektif bagi penerima yang tidak memiliki ATM, menyampaikan persyaratan melalui grup WhatsApp, dan berdasarkan keterangan kedua informan menyerahkan bantuan sebesar Rp450.000 tanpa pemotongan. Orang tua menyatakan bahwa bantuan dimanfaatkan untuk membeli buku, alat tulis, tas, dan seragam sehingga meringankan pengeluaran pendidikan keluarga. Temuan ini mengindikasikan kemudahan prosedural dan manfaat ekonomi jangka pendek pada kasus yang diteliti, tetapi belum dapat digunakan untuk menyimpulkan efektivitas PIP atau pemerataan pendidikan secara luas karena keterbatasan informan dan waktu pengumpulan data.
Kata Kunci: *pandangan orang tua; Program Indonesia Pintar; akses pendidikan; madrasah ibtidaiyah; penyaluran bantuan*

Copyright: © 2026. The author(s)
Jurnal Kependidikan Islam is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PENDAHULUAN

Pemerataan akses pendidikan merupakan salah satu amanat konstitusi Indonesia. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Namun, akses tersebut dapat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi rumah tangga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan belajar yang tetap muncul meskipun anak telah terdaftar di sekolah. Kajian mengenai pemerataan akses pendidikan menempatkan hambatan pembiayaan sebagai persoalan yang perlu ditangani melalui kebijakan yang mendukung keberlanjutan sekolah.[1]

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu instrumen bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Secara konseptual, bantuan ini dimaksudkan untuk mengurangi kendala biaya personal pendidikan dan mendukung kelangsungan pendidikan peserta didik. Dalam konteks madrasah, pelaksanaannya melibatkan koordinasi antara lembaga pendidikan, keluarga penerima manfaat, dan pihak penyalur. Keterbukaan informasi, kemudahan prosedur, dan pemanfaatan bantuan menjadi aspek penting untuk menilai pengalaman penerima.[2]

Penelitian terdahulu memperlihatkan kondisi implementasi PIP yang tidak seragam. Rohaeni dan Saryono pada penelitiannya menggambarkan peran pembagian tugas pelaksana dalam mendukung implementasi program[3], sedangkan Hasan et al. pada penelitiannya mencatat keluhan masyarakat tentang waktu pencairan bantuan.[4] Agusman pada penelitiannya juga mengidentifikasi hambatan berupa keterlambatan penyaluran, pengawasan, dan sosialisasi.[5] Temuan yang berbeda tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji bagaimana penerima memahami dan mengalami prosedur penyaluran bantuan pada tingkat satuan pendidikan.

Konteks penelitian ini adalah MI Ma'arif Ngliseng di Bantul, Yogyakarta. Berdasarkan data yang dicatat dalam naskah penelitian, 54 dari 103 peserta didik tercatat menerima bantuan PIP. Pada kasus yang diteliti, bantuan untuk peserta didik dinyatakan sebesar Rp450.000. Sekolah membantu pencairan secara kolektif bagi orang tua yang tidak memiliki ATM; sebaliknya, penerima yang memiliki ATM dapat melakukan pencairan sendiri. Mekanisme tersebut menarik untuk dianalisis karena mempertemukan kebutuhan kemudahan layanan dengan tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas penyaluran.

Berbeda dari penelitian yang menitikberatkan evaluasi program secara luas, artikel ini membatasi analisis pada pengalaman satu orang tua penerima bantuan, disandingkan dengan keterangan seorang guru pengelola PIP serta informasi dokumenter yang tersedia. Tujuannya ialah menjelaskan (1) bagaimana prosedur penyaluran bantuan dipersepsikan oleh orang tua dan (2) bagaimana bantuan tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan anak. Kontribusi penelitian terletak pada pembacaan kasus mikro mengenai keterkaitan antara tata kelola penyaluran dan beban biaya keluarga, bukan pada pengukuran dampak PIP terhadap pemerataan pendidikan secara populasi.

---

[1] Lukman Hakim, "Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2016): 53–64, doi:10.30596/edutech.v2i1.575.; Thomas Joni Verawanto Aristo, "Analisis Permasalahan Pemerataan Pendidikan Di Kabupaten Sintang," *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 7, no. 1 (2019): 25–34, doi:10.21831/amp.v7i1.10923.

[2] Bella Ghia Dimmera and Pebria Dheni Purnasari, "PERMASALAHAN DAN SOLUSI PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BENGKAYANG," *Sebatik* 24, no. 2 (2020): 307–14, doi:10.46984/sebatik.v24i2.1137.; Lilik Fadzlun et al., "Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Di Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo," *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2021): 79–92, doi:10.54437/alidaroh.v5i1.192.

[3] N.Eni Rohaeni and Oyon Saryono, "Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan," *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review* 2, no. 1 (2018): 193–204, https://jurnal.unigal.ac.id/ijemar/article/view/1824.

[4] Ismail Hasan, Agus Widodo, and Suratman Suratman, "Persepsi Masyarakat Terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) Di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk," in *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran) 4*, 2021, 853–63, doi:10.29407/29r04h33.

[5] Yudi Agusman, "Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka," *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 2 (2019): 105–13, doi:10.22225/pi.4.2.2019.105-113.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal di MI Ma'arif Ngliseng, Bantul, Yogyakarta. Pengumpulan data dilaksanakan pada 19–21 Mei 2023. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan proses penyaluran bantuan PIP berdasarkan pengalaman informan pada satu konteks madrasah, tanpa bermaksud melakukan generalisasi statistic.[6]

Sumber informasi utama terdiri atas dua orang: G1, seorang guru perempuan berusia 35 tahun yang terlibat dalam pengelolaan PIP, dan G2, seorang orang tua perempuan berusia 41 tahun yang menerima manfaat bantuan untuk anaknya. Pemilihan keduanya berlandaskan keterlibatan langsung dalam prosedur penyaluran yang dikaji. Karena hanya mencakup seorang orang tua, istilah "pandangan orang tua" dalam artikel ini merujuk pada pengalaman informan G2, bukan representasi seluruh orang tua penerima PIP.

Teknik pengumpulan data mencakup wawancara menggunakan pedoman empat pertanyaan, observasi, dan dokumentasi sebagaimana tercantum dalam catatan penelitian. Pertanyaan wawancara meliputi prosedur penyaluran, nominal bantuan, kesulitan dalam penerimaan, dan manfaat bantuan yang dirasakan. Istilah "wawancara mendalam" tidak digunakan karena naskah awal tidak memuat informasi yang memadai mengenai durasi tiap sesi maupun proses penggalian lanjutan untuk mendukung penggolongan tersebut. Observasi dan dokumen digunakan sebagai konteks penjelas alur penyaluran, bukan sebagai dasar untuk mengklaim audit keuangan menyeluruh.

Analisis mengacu pada tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian temuan menurut tema, dan penarikan kesimpulan sebagaimana kerangka analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian awal.[7] Informasi G1 dan G2 dibandingkan untuk memeriksa kesesuaian keterangan tentang prosedur serta jumlah dana, sementara dokumen penarikan diposisikan sebagai informasi pendukung. Tema analisis difokuskan pada transparansi prosedural dan manfaat bantuan bagi kebutuhan pendidikan. Pernyataan mengenai transparansi dibatasi pada pengalaman serta bukti yang dijelaskan informan; penelitian ini tidak melakukan pemeriksaan independen seluruh transaksi.

Keterbatasan metodologis yang perlu diperhatikan adalah jumlah informan yang sangat terbatas, cakupan pengamatan selama tiga hari, dan tidak tersedianya rincian durasi maupun rekaman analisis wawancara dalam naskah sumber. Oleh karena itu, kesimpulan diarahkan pada deskripsi kasus dan tidak digunakan untuk menilai kepuasan semua penerima, ketepatan sasaran secara keseluruhan, ataupun dampak kausal program terhadap keberlanjutan sekolah.

Tabel 1. Karakteristik Informan

Kode	Peran	Jenis kelamin	Usia
G1	Guru pengelola PIP	Perempuan	35 tahun
G2	Orang tua penerima bantuan	Perempuan	41 tahun

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyaluran Bantuan dan Keterbukaan Prosedural

Berdasarkan keterangan G1 dan G2, penyaluran bantuan PIP di MI Ma'arif Ngliseng dilakukan melalui dua jalur yang berkaitan dengan kemampuan penerima melakukan pencairan secara mandiri. Orang tua yang memiliki ATM dapat mengambil dana secara langsung, sedangkan sekolah membantu pencairan kolektif bagi orang tua yang tidak memiliki ATM. Mekanisme bantuan kolektif ini dipersepsikan G2 sebagai kemudahan karena keluarga tidak perlu menyelesaikan seluruh proses bank

[6] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2011); Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kulitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (RajaGrafindo, 2014).
[7] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kulitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*.

secara mandiri. Temuan ini menunjukkan fungsi sekolah bukan hanya sebagai penyampai informasi, melainkan juga sebagai penghubung administratif antara penerima dan bank penyalur.

Informasi tentang pertemuan dan persyaratan pencairan disampaikan melalui grup *WhatsApp* orang tua. Pada pertemuan pertama, penerima diminta menyerahkan salinan dokumen keluarga dan menandatangani dokumen penarikan yang disiapkan. Guru kemudian membantu proses pencairan di bank, disusul penyerahan uang kepada orang tua pada pertemuan berikutnya. Kedua informan menyebutkan nominal yang diterima sebesar Rp450.000 dan menggambarkan penyerahan bantuan secara utuh. Kesesuaian dua keterangan ini mendukung gambaran adanya urutan prosedur yang dipahami oleh pelaksana dan penerima, tetapi tidak setara dengan verifikasi independen atas semua penerima dan transaksi.

Dari perspektif tata kelola, komunikasi mengenai persyaratan dan jadwal merupakan bentuk transparansi prosedural: penerima mengetahui langkah yang perlu ditempuh dan siapa yang membantu pencairan. Akan tetapi, transparansi tidak hanya bergantung pada pemberitahuan awal, melainkan juga pada kemampuan penerima menelusuri nominal hak, bukti penyerahan, dan mekanisme pengaduan apabila terdapat ketidaksesuaian. Naskah sumber belum menyajikan data terperinci tentang aspek pengaduan atau pemeriksaan silang seluruh bukti transaksi. Dengan demikian, kesimpulan yang lebih tepat ialah bahwa G2 menilai proses penyaluran jelas dan memudahkan, bukan bahwa akuntabilitas program telah terbukti secara komprehensif.

Temuan ini memiliki titik temu dengan Rohaeni dan Saryono (2018), yang menyoroti pentingnya kerja pelaksana dalam implementasi PIP, serta Haq et al. (2023), yang melaporkan praktik bantuan pencairan kolektif pada konteks madrasah lain. Namun, mekanisme yang dinilai mudah pada kasus ini tidak menghapus kemungkinan hambatan di tempat lain. Hasan et al. (2021) dan Agusman (2019) mencatat persoalan keterlambatan dan sosialisasi. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa persepsi penerima terhadap program bergantung pada praktik pelaksanaan lokal; keberhasilan komunikasi sekolah dapat menjadi faktor pendukung, tetapi belum menjamin setiap dimensi penyelenggaraan PIP bebas masalah.

Bila dikaitkan dengan prinsip keterbukaan pelaksanaan PIP yang dirujuk pada Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 dalam naskah awal, fakta bahwa orang tua menerima penjelasan prosedur dan mengetahui jumlah bantuan merupakan indikasi kesesuaian pada aspek yang teramati. Namun, penilaian kepatuhan hukum secara menyeluruh memerlukan pemeriksaan ketentuan yang berlaku untuk jalur PIP madrasah dan bukti administrasi lengkap. Oleh sebab itu, penelitian ini menempatkan ketentuan tersebut sebagai rujukan analisis, bukan sebagai dasar sertifikasi kepatuhan seluruh proses.

Pemanfaatan Bantuan untuk Kebutuhan Pendidikan Keluarga

Informan G2 menjelaskan bahwa dana PIP membantu memenuhi pengeluaran sekolah anak, terutama buku, alat tulis, tas, dan seragam. Informan G1 turut menggambarkan bahwa keluarga penerima umumnya memiliki keterbatasan ekonomi dan sebagian bekerja pada sektor pertanian atau kerajinan anyaman. Keterangan tersebut mengarah pada dua aspek manfaat: bantuan menyediakan tambahan sumber pembiayaan kebutuhan belajar dan mengurangi beban pengeluaran yang harus ditanggung keluarga pada waktu pencairan.

Manfaat yang tergambar di sini bersifat langsung dan spesifik pada pengeluaran pendidikan. Ketika kebutuhan buku atau perlengkapan sekolah dapat dibeli menggunakan bantuan, keluarga memiliki ruang yang lebih besar untuk mengalokasikan penghasilan ke kebutuhan lainnya. Dalam kerangka akses pendidikan, berkurangnya hambatan biaya personal dapat membantu peserta didik mengikuti kegiatan belajar dengan perlengkapan yang diperlukan. Akan tetapi, penelitian tidak mengukur perubahan

kehadiran, prestasi, tingkat putus sekolah, maupun keberlanjutan pendidikan sebelum dan sesudah bantuan, sehingga hubungan terhadap pemerataan pendidikan tetap berupa implikasi yang masuk akal, bukan dampak yang telah dibuktikan.

Hasil ini sejalan dengan tujuan bantuan pembiayaan pendidikan yang dibahas Dimmera dan Purnasari pada tahun 2020 serta kajian Marsidi et al. ditahun 2023 mengenai pengalaman penerima bantuan.[8] Dalam konteks yang lebih luas, Sudaisy pada penelitian tahun 2024 mengkaji kaitan PIP dengan keberlanjutan pendidikan pada satuan pendidikan berbeda.[9] Perbandingan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana untuk kebutuhan sekolah merupakan tahapan awal penting, tetapi evaluasi hasil pendidikan memerlukan indikator lanjutan yang tidak tersedia pada studi ini.

Posisi orang tua dalam penyaluran bantuan perlu dipahami sebagai penerima informasi sekaligus pengambil keputusan penggunaan dana. Ketika orang tua mengetahui jumlah hak dan dapat memperoleh dana dengan prosedur yang dipahami, kemungkinan pemanfaatan untuk kebutuhan pendidikan dapat meningkat. Namun hubungan tersebut belum diuji secara kausal di penelitian ini. Hasil penelitian lebih tepat dibaca sebagai pengalaman positif satu keluarga penerima terhadap dukungan administratif sekolah serta penggunaan bantuan untuk biaya belajar.

Implikasi Bagi Pemerataan Pendidikan dan Batas Interpretasi

Secara normatif, PIP merupakan salah satu upaya mengurangi ketimpangan kesempatan belajar yang terkait kondisi ekonomi. Pada kasus MI Ma'arif Ngliseng, terdapat dua mekanisme pendukung yang dapat diidentifikasi: bantuan administratif untuk mengatasi kendala akses pencairan dan dukungan finansial guna membeli perlengkapan sekolah. Kedua mekanisme ini relevan terhadap dimensi keterjangkauan pendidikan, tetapi tidak cukup untuk menyatakan bahwa pemerataan pendidikan pada tingkat madrasah atau wilayah telah tercapai.

Karena studi menggunakan seorang orang tua dan seorang guru, kemungkinan variasi pengalaman penerima lain belum terwakili. Penelitian juga belum membandingkan keluarga penerima dengan keluarga yang tidak menerima bantuan, belum memeriksa ketepatan sasaran berdasarkan data sosial ekonomi secara independen, serta belum menelusuri penggunaan bantuan dalam jangka panjang. Temuan harus dipahami sebagai deskripsi pengalaman dan praktik yang dilaporkan dalam satu kasus.

Bagi madrasah, temuan memberikan dasar untuk mempertahankan komunikasi prosedur yang jelas sekaligus memperkuat pencatatan penyerahan bantuan dan kanal penyampaian keluhan. Untuk penelitian selanjutnya, pendalaman dapat dilakukan dengan menambah keragaman informan orang tua, memperpanjang waktu pengumpulan data, mendokumentasikan alur administrasi tanpa membuka dokumen identitas pribadi, dan mengukur keterkaitan penerimaan bantuan dengan indikator keberlanjutan sekolah. Langkah tersebut akan memperkuat penilaian manfaat program melebihi persepsi penerima tunggal.

KESIMPULAN

Pada studi kasus di MI Ma'arif Ngliseng Bantul, orang tua yang diwawancarai memandang penyaluran PIP cukup jelas dan memudahkan. Sekolah dilaporkan menyampaikan persyaratan melalui

[8] Dimmera and Purnasari, "PERMASALAHAN DAN SOLUSI PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BENGKAYANG"; Marsidi Marsidi, Supawanhar Supawanhar, and Wira Lestari, "Analisis Kepuasan Penerima Bantuan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) Di Sekolah Dasar Negeri 68 Desa Air Putih Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah," *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2023): 601–12, doi:10.37676/ekombis.v11i1.3281.

[9] Firman Sudaisy, "Peran Program Indonesia Pintar (PIP) Dan Keberlanjutan Pendidikan Peserta Didik Di SMA Darul Hikmah Mataram," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 4 (2024): 2325–30, doi:10.29303/jipp.v9i4.2780.

grup *WhatsApp*, membantu pencairan kolektif bagi penerima tanpa ATM, dan menyerahkan bantuan sebesar Rp450.000 sesuai keterangan kedua informan. Bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seperti buku, alat tulis, tas, dan seragam sehingga dipersepsikan mengurangi beban biaya keluarga. Temuan menunjukkan manfaat prosedural dan ekonomi pada kasus yang diteliti, tetapi tidak membuktikan kepatuhan seluruh transaksi maupun pencapaian pemerataan pendidikan secara luas. Batas penafsiran ini penting mengingat penelitian hanya melibatkan dua informan dan berlangsung selama tiga hari. Madrasah disarankan menjaga keterbukaan jadwal, persyaratan, nominal bantuan, dan dokumentasi penyerahan kepada penerima dengan tetap melindungi data pribadi. Penelitian berikutnya sebaiknya melibatkan lebih banyak orang tua dengan pengalaman berbeda, pelaksana program dan pihak penyalur, serta memperpanjang pengamatan agar memungkinkan triangulasi yang lebih kuat. Kajian lanjutan dapat menambahkan indikator kehadiran, keberlanjutan sekolah, dan penggunaan bantuan dari waktu ke waktu untuk menilai keterkaitan PIP dengan pemerataan pendidikan secara lebih meyakinkan.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kulitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. RajaGrafindo, 2014.

Agusman, Yudi. "Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka." *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 2 (2019): 105–13. doi:10.22225/pi.4.2.2019.105-113.

Aristo, Thomas Joni Verawanto. "Analisis Permasalahan Pemerataan Pendidikan Di Kabupaten Sintang." *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 7, no. 1 (2019): 25–34. doi:10.21831/amp.v7i1.10923.

Dimmera, Bella Ghia, and Pebria Dheni Purnasari. "PERMASALAHAN DAN SOLUSI PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BENGKAYANG." *Sebatik* 24, no. 2 (2020): 307–14. doi:10.46984/sebatik.v24i2.1137.

Fadzlun, Lilik, Zaidatun Ni'mah, Lindah Ayu Lestari, Lilik Huriyah, and Abdul Rahman. "Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Di Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo." *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2021): 79–92. doi:10.54437/alidaroh.v5i1.192.

Hakim, Lukman. "Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2016): 53–64. doi:10.30596/edutech.v2i1.575.

Hasan, Ismail, Agus Widodo, and Suratman Suratman. "Persepsi Masyarakat Terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) Di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk." In *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran) 4*, 853–63, 2021. doi:10.29407/29r04h33.

Marsidi, Marsidi, Supawanhar Supawanhar, and Wira Lestari. "Analisis Kepuasan Penerima Bantuan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) Di Sekolah Dasar Negeri 68 Desa Air Putih Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2023): 601–12. doi:10.37676/ekombis.v11i1.3281.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2011.

Rohaeni, N.Eni, and Oyon Saryono. "Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan." *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review* 2, no. 1 (2018): 193–204. https://jurnal.unigal.ac.id/ijemar/article/view/1824.

Sudaisy, Firman. "Peran Program Indonesia Pintar (PIP) Dan Keberlanjutan Pendidikan Peserta Didik

Di SMA Darul Hikmah Mataram." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 4 (2024): 2325–30. doi:10.29303/jipp.v9i4.2780.